



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**RELASI KUASA ANTARA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

YOULANDA SARI HUTAGAOL
2063201108

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



**RELASI KUASA ANTARA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

Youlanda Sari Hutagaol
2063201108

**PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Youlanda Sari Hutagaol

No. Mahasiswa : 2063201108

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl Yosudarso km.08 Rumbal Pekanbaru Hp.0895-6236-28013
Kode Pos : 28265 website : <https://fia.unilak.ac.id/> email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Youlanda Sari Hutagaol
No. Mahasiswa : 2063201108
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Relasi Kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing I

Alexsander Yandra, S.IP., M.Si
NIDN: 1008058605

Pembimbing II

Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos., MPA
NIDN : 1016018201

Mengetahui :

Ketua Prodi Administrasi Publik



Para Merian Sari, S.Sos, M.si
NIDN :1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Youlanda Sari Hutagaol
NIM : 2063201108
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alessander Yandra, S.IP.,MSi	()
Pembimbing	: Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos.,MPA	()
Penguji	: Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA	()
Penguji	: Pebriana Marlinda, S.Sos.,MAP	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 17 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi”** tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Saya juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang turut membantu, sehubungan dengan itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr., Li. Dra Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

7. Bapak Alexsandar Yandra, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan ketelitian serta arahan yang sangat baik untuk saya selama bimbingan berlangsung.
8. Ibu Fajarwaty Kusumawardhani S.Sos.,MPA selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk saya selama proses bimbingan berlangsung sampai dengan penulisan.
9. Bapak Arjuna Ginting selaku Manager, dan Bapak Andika Pratama Tarihoran, S.P selaku Asisten dan pegawai staff yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Erik Fernando Siburian selaku Kepala Tata Usaha PT. Cerenti Subur yang penuh kesabaran dan memberikan informasi data-data yang saya butuhkan dalam penulisan.
11. Kepala Bidang Dinas Perkebunan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktu dan Informasi yang saya butuhkan.
12. Kepada kedua orang tua saya, abang dan kakak saya dan seluruh keluarga saya tercinta yang selalu mendukung dan memberikan baik materi maupun moril serta doa-doa yang tidak putus-putusnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
13. Terima kasih kepada abah M. Zulkarnain dan ibuk Gurniati yang selaku orang tua angkat yang selalu mendukung dan memberikan materi serta doa-doa kepada saya selama masa hidupnya.

14. Terima kasih untuk BTS. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Dan teruntuk Jeon Jungkook yang selalu memberikan Hiburan dan selalu Live sehingga menjadi moodbooster di saat peneliti Lelah serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi.
15. Rosnita Nauli Manurung, S. AP yang sudah menjadi teman yang sabar dan membantu, mengarahkan, dan memberi semangat pada penulis ditengah-tengah kesibukan pekerjaan.
16. Sabar Eben Lumban Gaol yang sudah menjadi sahabat dari Sekolah Dasar sampai jenjang perkuliahan, dan memberi semangat serta dukungan.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

(Youlanda Sari Hutagaol)

Nama : Youlanda Sari Hutagaol
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Relasi Kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit
dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi kuasa antara perkebunan kelapa sawit dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa aktor pemerintahan yang melakukan penyimpangan atas relasi yang sudah terjalin dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Hubungan yang terjadi menyebabkan praktik relasi yang tidak seimbang, yang akhirnya hanya menguntungkan pihak pemerintah dan perusahaan sehingga telah membuat masyarakat merasakan diabaikan. Terlihat dari bentuk-bentuk relasi yang timbul dan berjalan sampai saat ini menarik sejumlah aktor pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terlibat kasus dengan perkebunan kelapa sawit yang ada, dengan pemeberian jaminan yang sangat besar sehingga menguntungkan secara individu maupun kelompok.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Perkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan.

Name : Youlanda Sari Hutagaol
Study Program : Public Administration
Title : *Power Relations Between Oil Palm Plantations and the Kuantan Singingi District Government*

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the power relations between oil palm plantations and the Kuantan Singingi Regency government. This research uses qualitative methods, data collection uses interview techniques, direct observation and documentation. The results of the research show that there are several government actors who have violated existing relationships with oil palm plantations. The relationship that occurs leads to unbalanced relationship practices, which ultimately only benefit the government and companies, making the community feel neglected. It can be seen from the forms of relations that have arisen and are ongoing to date that a number of Kuantan Singingi Regency government actors are involved in cases with existing oil palm plantations, by providing very large guarantees so that they benefit both individuals and groups.

Keywords : Power Relations, Palm Oil Plantations, Companies

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Relasi Kuasa	13
2.1.2 Jenis-jenis relasi Kuasa.....	16
2.1.3 Unsur-Unsur Relasi Kuasa.....	17
2.1.4 Aktor Politik.....	19
2.1.5 Aktor Pemerintah.....	21
2.1.6 Aktor Perusahaan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Fokus Penelitian	27
2.4 Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Bentuk Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Jenis Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Singkat PT. Cerenti Subur.....	38
4.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	40
4.3 Profil Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi	41

4.4 Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	42
4.5 Struktur Organisasi Perusahaan	45
4.6 Tugas dan Wewenang Bagian dalam PT.Cerenti Subur	45
4.7 Sarana dan Prasarana PT. Cerenti Subur.....	48
4.8 AktifitasPerusahaan.....	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Relasi Kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemerintah.....	55
5.1.1 Power Over (Pengendalian).....	56
5.1.2 Power To.....	58
5.1.3 Power With	60
5.1.4 Power Within	62
5.2 Faktor Yang Menimbulkan Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.....	65
BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Luasan Hektar Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi	2
Tabel 1.2	Data Nama Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel 1.3	Data Asset yang disita Pemerintah.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1	Data Jumlah Pegawai PT. Cerenti Subur Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan Terakhir	48
Tabel 4.2	Sarana dan Prasarana PT. Cerenti Subur.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Divisi	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Umum	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia sebagai penghasil komoditas kelapa sawit. harga sawit cenderung tinggi karena selalu dibutuhkan untuk industri pangan dan kimia. muncul euforia untuk menggunakan CPO sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi, khususnya di negara-negara Eropa. Sedangkan pasokan CPO dunia ditentukan oleh Indonesia, sebagai produsen CPO terbesar di dunia dan Malaysia diurutan kedua (Raharjo,2010).

Walaupun dari luas areal lahan dan produksi CPO Indonesia melampaui Malaysia, namun dari segi keuntungan Malaysia masih jauh lebih besar dari Indonesia (Dermawan, 2010). Meskipun awalnya ditanam untuk perkebunan besar, kelapa sawit telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Dan menjadi kelompok penghasil komoditas perkebunan kelapa sawit. Peningkatan ini sebagian besar terjadi di Asia Tenggara, dengan peningkatan produksi yang luar biasa di Indonesia dan Malaysia (Sudrajat,2020). Salah satu penghasil kelapa sawit yaitu provinsi Riau dan khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Daerah yang dikenal dengan tempat wisata pacu jalur atau festival budaya melayu, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kuansing

Kecamatan	Kelapa Sawit		
	2021	2022	2023
Kuantan Mudik	19 679,00	31 083,32	35 027,96
Hulu Kuantan	13 979,65	17 291,65	17 291,65
Gunung Toar	696,42	8 029,49	2 040,73
Pucuk Rantau	7 777,00	39 853,90	39 853,90
Singingi	11 896,60	11 896,60	46 241,75
Singingi Hilir	28 641,50	36 448,50	44 858,00
Kuantan Tengah	9 142,00	26 536,20	37 378,25
Sentajo Raya	8 483,70	21 188,08	21 194,08
Benai	7 454,45	5 941,17	5 961,17
Kuantan Hilir	7 978,23	2 956,14	1 972,14
Pangean	4 646,50	2 583,58	3 780,58
Logas Tanah Darat	17 612,27	14 297,50	14 297,50
Kuantan Hilir Seberang	358,25	5 524,00	10 464,68
Cerenti	984,16	10 213,76	7 387,66
Inuman	3 642,95	1 786,00	1 786,00
Kuantan Singingi	142 927,68	195 776,03	289 536,06

Sumber data: Dinas Perkebunan Kuansing 2024

Perusahaan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan di dirikan, berkependudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dapat di lihat sebagai acuan setiap perusahaan yang berdiri telah diatur dan mengikuti syarat ketentuan dari pemerintah setempat sebagai bentuk penduduk Indonesia, meskipun kepemilikan dari perusahaan ini adalah orang asing tetapi tetap mengikuti sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut. dalam mendirikan suatu perusahaan.

Beberapa perusahaan yang menjadi landasan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti perusahaan kelapa sawit, barang dan jasa. Sebagian

masyarakat mengelola lahan swadaya atau mandiri untuk memenuhi kebutuhan. Kehadiran perusahaan yang besar di daerah ini merupakan perusahaan asing yang dikelola bukan dari masyarakat setempat melainkan luar daerah. Dan untuk petani sawit kecil menjual hasil panen nya ke pabrik perusahaan karna dengan harga yang sesuai dan tinggi.

PT. Cerenti Subur merupakan salah satu cabang dari Duta Palma Nusantara yang beralamatkan di Kebun Pulau Panjang Hilir. Yang menjadi wadah sebagai sumber informasi. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini di fasilitasi dengan perbedaan jabatan dan posisi selama bekerja. Perusahaan ini berkembang dengan sangat cepat dalam memperoleh lahan dan pengolahan hasil panen kelapa sawit.

Serta para petani kelapa sawit yang selama ini menjual hasil panen, berupa tandan buah segar (TBS) ke sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) milik Cerenti Subur. Perusahaan ini memperoleh lahan perkebunan dengan mengolah atau membudidayakan kelapa sawit secara swadaya kemudian membangun beberapa sejumlah pabrik untuk memuaskan permintaan dari komoditas yang menjadi sumber pemasukan perusahaan ini dan mampu memberikan peluang pekerjaan secara besar kepada setiap masyarakat Kuansing dan masyarakat perantau.

Di dalam perusahaan kekuasaan menempati posisi yang tinggi dan mampu mengendalikan serta mengerakkan seseorang. Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992). Mempesona karena berhadapan dengan seseorang penguasa (raja, presiden,). Menurut konsep pemikiran Michael Foucault, menjelaskan bahwa relasi kuasa merupakan sebuah kekuasaan satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan dan

hubungan perusahaan dengan pemerintah yang terjalin nyata dan dapat dirasakan oleh karyawan maupun masyarakat setempat. yakni pemberian dana pada hari-hari besar seperti bulan puasa dan hari kemerdekaan 17 agustus. Perbaikan jalan yang di lalui oleh masyarakat dan karyawan perusahaan, membuka lowongan kepada masyarakat untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan job kerja. Membayar pajak, Selalu menjaga komunikasi, baik dari pembuatan aturan maupun penerima aturan yang dimana sama-sama menguntungkan.

Bentuk CSR yang diberikan yaitu seperti pemberian dana honor kepada Desa, polsek dan guru yang diberikan dengan jumlah Rp.26.400.000/ tahun nya atau dibayarkan setiap bulan nya dengan jumlah Rp.2.200.000/ bulan nya untuk tiga Honor yang bersangkutan dimulai dari tahun 2021 sampai 2023 belum ada penambahan dana atau perubahan untuk dana Honor tersebut.

Adapun jumlah perusahaan kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak, sehingga masyarakat dari luar daerah beradaptasi ke daerah ini untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Tabel 1.2 Data Nama Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Kuansing.

No	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. PANTAI RAJA	TJ. Pauh
2.	PT. SAR 1 PMKS singing	Singingi Hilir
3.	PT. SAR II	Singingi Hilir
4.	PT. Adi Mulya	Singigi Hilir
5.	PT. Wanasari	Singingi Hilir
6.	PT. Mustika Agro Lestari (PKS)	Tj. Pauh
7.	PT. Mustika Agro Lestari	Tj. Pauh
8.	PT. Sinar Utama Nabati PKS	Singingi
9.	PT. Tamora Agro Lestari	Hulu Kuantan
10	PT. Asia Sawit Makmur jaya	Kuantan Tengah
11	PT. UKM PKS	Kuantan Tengah
12	PT. Gemilang Sawit Lestari	Inuman
13	PT. Tribakti Sarimas	Kuantan Mudik
14	PT.CRS 1 PKS	LTD
15	PT.CRS 2 PKS	Sentajo Raya
16	PT. CRS 3	LTD
17	PT. Indo Sawit (IS)	Singingi Hilir
18	PT. Duta Palma Nusantara	Benai
19	PT. Cerenti Subur	Cerenti
20	PT. Wanajingga	Basrah
21	PT.Pandawa Satria Nusantara	Telukkuantan
22	PT. Udaya Logjinawi	Serosah
23	PT. Sar PMKS	Singingi Hilir
24	PT. Sar Kebun sei Baso	Singingi Hilir
25	PT. Adi Mulya agro Lestari	Singingi Hilir
26	PT. Agung Toyota	Kuantan Tengah
27	PT. Wanasari Sei Jake	Sei jake
28	PT. Nusantara Services	PKS Wanasari
29	PT. Sandria Sukses Bersama	Jake
30	PT. Sumbergraha Sejahtera	Jalur Patah

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Cerenti Subur berdampak pada perekonomian lokal seperti yang terjadi di wilayah kabupaten kuantan singingi. Tentunya pendapatan asli daerah (PAD) akan jauh lebih meningkat karena dapat diperoleh dari pajak perusahaan dan pabrik. Perubahan ekonomi masyarakat dapat dirasakan dengan tumbuh nya bisnis lain nya.

Selain itu perubahan sosial Masyarakat juga dapat di pengaruhi oleh keberadaan perusahaan, dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang akan semakin membaik karena perusahaan ini membangun sekolah dan klinik serta rumah sakit yang besar. Dengan ketentuan masyarakat yang asli karyawan perusahaan tidak membayar biaya perobatan serta gizi anak dapat teratasi.

Eksistensi perusahaan berpotensi besar terhadap lingkungan yang bisa mengarah ke arah negative maupun positif. Beberapa polemik yang terjadi terkait kasus perusahaan perkebunan kelapa sawit dan menyeret sejumlah pemangku pemerintahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- **Perusahaan Group Duta Palma ini digugat dalam kawasan Hutan.**

Yang menyebabkan manajemen perusahaan menutup akses warga. Dalam surat nya perusahaan menyebut lahan garapan warga sebagai hasil okupasi warga dan mengancam warga, bahwa perusahaan akan menutup akses jalan jika warga tidak membayar ganti rugi. (Sumber RiauBisa.com)

- **Kasus suap Izin perkebunan sawit, Mantan Bupati Kuansing di tuntutan 8,5 Tahun di penjara**

Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) terjerat kasus suap perpanjangan Izin Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit PT. Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuansing. Dan dinilai telah melanggar Pasal 12 Huruf A UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

- **Perusahaan memutus jalan akses masyarakat**

Sehubungan dengan informasi yang didapat dari masyarakat setempat bahwa perusahaan memutus jalan yang menjadi akses utama bagi masyarakat jika melakukan perjalanan ke lahan karet mereka. Di duga pihak manajemen perusahaan melaporkan bahwa hasil panen perusahaan ada yang dicuri oleh masyarakat namun masyarakat menyela pernyataan tersebut dan di anggap menghina. Masyarakat setempat mengatakan bahwa perusahaan sengaja menutup akses jalan tersebut dikarenakan itu adalah bentuk upaya agar masyarakat dapat menjual lahan atau kebun nya kepada pihak perusahaan. Apabila benar adanya perusahaan kehilangan bibit atau hasil panen maka seharusnya perusahaan dapat membangun pos-pos keamanan dan masyarakat tidak keberatan bukan memutus akses jalan.

- **Ribuan Masyarakat dan Karyawan Demo Pada Perusahaan**

Aksi demo yang dilakukan ribuan karyawan dan masyarakat selama 19 hari menuntut hak nya mengenai upah gaji yang belum dibayarkan pihak perusahaan, demonstrasi ini terjadi diperkebunan secara langsung dan menyita partisipasi anak-anak mereka serta menginap di lokasi demo dengan seadanya. Aksi ini menjadi bentuk penekanan terhadap pihak manajemen perusahaan dan demo ini tidak terjadi begitu saja. Sudah ada sebelumnya kesepakatan pemerintah melalui dinas tenaga kerja namun sampai saat ini karyawan belum mendapatkan pergerakan dari disnaker justru dianggap adanya pembiaran oleh pemerintah setempat.

Dari beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa pemerintah sebagai pemangku kepentingann dalam tatanan suatu daerah melibatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, terutama dalam kasus perkebunan sawit ini.

Aktor pemerintah yang terlibat kasus perkebunan kelapa sawit seperti Bupati Kuantan Singingi yang terbukti bersalah menerima uang suap terkait perizinan perkebunan dari General Manager. Pemilik perusahaan PT. Cerenti Subur ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penguasaan lahan dan pencucian uang, kemudian dipengadilan pertama dihukum 15 tahun penjara, denda Rp. 1 miliar, membayar uang pengganti Rp.2,23 triliun serta membayar perekonomian negara Rp. 39,7 triliun. Sejauh ini masyarakat kuansing sangat kecewa dengan kasus perkebunan kelapa sawit, yang dianggap ada beberapa aktor pemangku kepentingan terlibat bahkan membantu pihak perkebunan. Seharusnya pemerintah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar seperti:

Menurut Arif (Muhardi, dkk, 2014:69) peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat itu juga penting sehingga pemerintah mengetahui peran yang sebenarnya itu dibagi menjadi empat peran yaitu.

1. Peran pemerintah sebagai Regulator
2. Peran pemerintah sebagai Dinamisator
3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator
4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Relasi kuasa yang terjadi biasanya disebabkan oleh problematika yang timbul antara pihak perkebunan atau pemerintah dan berdampak besar pada lingkungan masyarakat. Permasalahan yang timbul lebih mengarah pada aktor pemerintah karna keinginan kelompok atau individu yang ingin memperkaya atau memperluas asset nya. Sedangkan relasi yang muncul secara umum tidak akan terlepas dari pemberkasan administrasi seperti sebagaimana dijelaskan permentan nomor 05

tahun 2019 menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan harus memiliki HGU untuk mendapatkan surat izin perkebunan (IUP) dan apabila perusahaan tidak memiliki HGU yang disepakati maka dianggap tidak resmi.

Beberapa permasalahan yang disebabkan pemilik perusahaan terjatir kasus Korupsi yang dianggap merugikan negara dengan sebanyak sebesar 78 Triliun. Namun ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan apabila perusahaan tersebut dicabut izin untuk beroperasi maka ada ribuan karyawan yang akan pengangguran. Oleh sebab itu pemerintah menyita beberapa asset yang akan disegel langsung, dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Data Aset yang Disita Pemerintah

No	Nama Aset	Jumlah
1.	Kantor	2
2.	Kendaraan Angkut Buah	20
3	Tanah	8.929

Sumber Data: PT. Cerenti Subur 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kejaksan agung kuansing menyita sejumlah asset perusahaan yang beralamatkan dikecamatan benai. Tim kejaksan agung langsung turun ke lokasi perusahaan yang menjadi terdakwa. Penyitaan asset yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya seperti 2 buah kantor PT.Cerenti Subur, kendaaraan angkut buah perusahaan sebanyak 20 unit dan satu bidang tanah perkebunan seluas 8.929 ha berdasarkan HGU 03 Kuantan Singingi.

Kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah dapat dilihat dari bencana banjir yang menimpa 6 Desa di daerah Kuansing, perusahaan secara langsung berpartisipasi untuk menangani dengan memberi bantuan berupa sembako yang di butuhkan korban banjir serta bantuan pada saat

masa Pandemi Covid-19 dan pemerintah daerah juga mendapatkan penghasilan atas setiap perusahaan yang beroperasi di daerah. perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang bijak yang mudah dipahami oleh masyarakat, namun masyarakat kecewa dengan pemerintah karena menganggap tidak lagi mendengarkan keluhan masyarakat justru juga terseret langsung oleh permasalahan. Pemangku kepentingan seperti memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa sistem pemerintah dapat dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada, yang memiliki kekuasaan penuh dan akan dijanjikan sebuah upah yang besar apabila dapat melancarkan seluruh kegiatan perusahaan seperti perluasan lahan.

Pemerintah dikawasan operasi perusahaan di kabupaten kuantan singingi dapat merupakan relasi yang dinamis begitu juga dengan pihak perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi kuat dan bisa mempengaruhi. Hal tersebut disebabkan oleh kehadiran perusahaan ditengah-tengah komoditas berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam serta ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah tidak lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan apa saja. Yang mana sudah diketahui bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang menyalahi aturan pemerintah tetapi beberapa aktor petinggi tidak merasa takut untuk melancarkan aksi dengan keuntungan yang akan diperoleh baik secara individu maupun kelompok. Karena setiap aktor yang melakukan kesalahan ditindak secara langsung namun hukuman yang ditetapkan tidak logis bahkan denda nya juga tidak besar dan asset yang dimiliki juga tidak disita. Oleh sebab itu hal ini dapat memicu keinginan

setiap aktor jika dipilih akan melakukan hal yang sama karna tidak ada perbedaan hukuman yang diberikan melainkan mendapatkan gerasi. Pemangku kepentingan tidak lagi menjalankan tugasnya dengan tepat selalu memiliki kepentingan yang akan menuju pada sebuah keuntungan yang besar tanpa memikirkan penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Seperti pada daerah ini yang melibat kan aktor pemerintah yakni Bupati yang terpilih akan tersangka kasus korupsi baik dengan perusahaan maupun pihak lain, apabila setiap relasi yang terjalin benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat agar sejahtera dan dapat meningkatkan ekonomi pada kabupaten Kuantan singingi mungkin tidak akan terjadi penyimpangan kekuasaan baik dari pihak pemerintah maupun perkebunan. Dengan begitu ditemukan beberapa permasalahan pada penelitian sebagai berikut.

1. Kurang nya disiplin Pemerintah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi pada daerah sehingga banyak pemerintah yang menjadi aktor secara langsung atas permasalahan pada perusahaan kelapa sawit.
2. Adanya penyimpangan kekuasaan yang timbul sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah setempat.

Dengan ditemukan nya permasalahan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai permasalahan yang telah diuraikan dan penulis tertarik untuk membuat judul penelitian ini, yaitu tentang bagaimana **“Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor yang menimbulkan relasi kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaiman Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menimbulkan Relasi Kuasa Anatara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini, adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian PT. Cerenti Subur sebagaimana hubungan antara perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam membuat kesimpulan penulis mengacu pada data yang telah didapat dan dianalisis sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian mengenai Relasi Kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Relasi yang timbul antara pemerintah dan perusahaan kelapa sawit seperti aspek sosial, administrasi, lingkungan dan mitra usaha. Hal ini yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Dari hubungan yang terbentuk ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku aktor swasta dan pemerintah dalam bekerjasama yang menyebabkan kerugian pada sektor yang bersangkutan seperti:

1. Kurangnya kesadaran pihak pemerintah
2. Kurangnya kesadaran pihak Swasta
3. Lemahnya sistem pemerintah
4. Sanksi dan denda tidak sebanding dengan kasus
5. Kurang merespon permasalahan masyarakat dan perusahaan kelapa sawit

Bentuk-bentuk Relasi Kuasa Antara Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut.

- Perizinan perusahaan, syarat utama yang harus ditemui ketika mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit serta disetujui oleh pemerintah daerah.

- Pemberian bantuan berupa dana, jasa, bahan, alat dan sembako yang disalurkan untuk diberikan kepada masyarakat, perangkat desa maupun keamanan dari perusahaan masih banyak yang tidak tepat sasaran karena kekuasaan dapat menutupi aksi yang melanggar.
- Perbaikan jalan dan pembangunan tempat ibadah seperti masjid, gereja dan sekolah.
- Pajak iuran wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum bentuk Relasi yang sudah terjalin terdiri dari beberapa aspek seperti aspek sosial, aspek mitra usaha dan aspek lingkungan. Karna kekuasaan dapat mempengaruhi segala aspek yang mendorong untuk melakukan kegiatan penyimpangan di dasari dengan ketidakpuasan akan jabatan, ekonomi dan asset.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran terkait Relasi Kuasa antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat sektor perkebunan sangat penting yang menjadi salah satu mata pencarian untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab semua permasalahan ekonomi. Sejak pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah justru akar permasalahan banyak di daerah terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, sejak relasi terjalin ada banyak aktor pemerintah yang terseret dalam kasus perkebunan. Untuk menghindari permasalahan perkebunan kelapa sawit dengan pemerintah sebagai berikut:

1. Bagi setiap aktor pemerintah lebih tegas dan disiplin lagi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya pada pemerintahan daerah
2. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus diterapkan secara adil dan tegas sehingga sistem pemerintahan berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. Khozin. “ Konsep Kekuasaan Michael Foucault. Teosofi: Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam”. Volume 01. No. 02 Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya: Desember 2011.
- Alwasilah, A. C. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar- dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif: Dunia Pustaka Jaya
- Destinasi wisata di Kelurahan Sei Gohong. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan, Volume 9, Issue 2, 2020.
- Fauziah, Dona. Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Foucault, Michael. *Power/ Knowledge*: wacana kuasa/pengetahuan. Yogyakarta: Investor Pariwisata dengan Masyarakat Lokal di Desa Pakraman, Kecamatan Ubud: Studi Kasus Konflik Sosial. Jurnal Destinasi Pariwisata Volume 5, Nomor 1, 2017.(Nugroho et al., 2016)
- Kutlu, T. (2023). Relasi Antara Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pulesari Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.,4(1), 88–100.
- Muslimin, I. (2020). Hubungan sosial patron klien antara petani sawit dengan tauke sawit di desa krueng itam kecamatan tadu raya kabupaten nagan raya. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Nugroho, A., Suharno, & Subroto, T. (2016). *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanian di Desa Prigelan*. 195.
- Relasi Kuasa pemerintah Desa dan Tengkulak terhadap petani Kakao di Desa hokeng Jaya Kecamatan Wulangitang Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. (2017). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>

Undang-Undang

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Perusahaan